

PPDB Sistem Zonasi Terus Disempurnakan

YOGYA (KR) - Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan model zonasi masih membutuhkan penyempurnaan. Lebih-lebih pada PPDB yang baru saja berlangsung mengundang reaksi pro dan kontra dari masyarakat.

Sejumlah persoalan masih mewarnai pelaksanaan PPDB sistem zonasi, seperti polemik status famili lain. Biasanya perpindah Kartu Keluarga (KK) tersebut dilakukan calon siswa ke dekat sekolah dengan harapan bisa lolos PPDB sesuai zonasi yang diinginkan.

"Pnyempurnaan sistem PPDB zonasi terus dilakukan. DIY juga akan melakukan evaluasi sesuai masalah yang ada di lapangan. Termasuk bagaimana mengatasi alamat KK-nya ada di satu tempat dekat sekolah, tapi anaknya tidak ada di situ. Kami sengaja melibatkan sejumlah pihak termasuk pengurus RT/RW di wilayah tersebut. Harapannya kecurangan dalam seleksi PPDB bisa ditekan," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya, baru-baru ini.

Didik mengatakan, meski secara umum pelaksanaan seleksi PPDB di DIY berlangsung cukup

baik, namun Disdikpora DIY tetap melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan PPDB setiap tahun. Namun, bukan berarti sistem zonasi akan dihapus, karena tujuan utama zonasi adalah memberi keadilan untuk semua masyarakat.

"Konsepnya, jangan semata-mata yang dekat terus diterima. Tapi, bagaimana daerah yang mungkin jauh dan tidak ada sekolah siswanya tetap bisa terakomodasi untuk mendapatkan sekolah," ungkap Didik.

Menurutnya, dalam konteks zonasi, ada kebutuhan untuk pemerataan input siswa. Artinya, siswa dengan kategori cerdas dan biasa saja bisa berada di satu sekolah sesuai zonasi. Pemerataan input bisa menyadarkan sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran. Ada siswa dengan kategori kecerdasan biasa saja yang tetap memerlukan perhatian dari sekolahnya.

"Dulu sebelum ada zonasi, anak yang kategori cerdas jadi satu sekolah. Kalau semua inputnya bagus, mungkin saja proses belajar mengajar di dalam sekolah itu kurang optimal. Karena budaya belajarnya sudah baik, jadi hasilnya tetap baik," terangnya. **(Ria)-f**

Sosialisasikan Program MBKM di Unimma

MAGELANG (KR) - Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi (Ilkom) Fakultas Psikologi dan Humaniora (FPH) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) melakukan sosialisasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada mahasiswa, baru-baru ini. Kegiatan ini diikuti mahasiswa semester 5 dan 6 yang merupakan salah satu program bagi mahasiswa dengan skema Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) dari Dikti tahun 2023.

Kaprodi Ilkom, Prihatin Dwi-

hantoro SSn menyatakan, seluruh program MBKM ditawarkan kepada mahasiswa diantaranya magang, proyek di desa, kewirausahaan serta penawaran lomba-lomba.

"Kegiatan ini untuk memberikan pengalaman di luar kampus kepada mahasiswa dan supaya mahasiswa dapat menuangkan ide kreatif," katanya.

Pemaparan juga disampaikan Penanggungjawab Program MBKM berkaitan dengan proses seleksi, diantaranya soal persyaratan, proses seleksi dan beberapa skema lain. **(Tha)-f**

DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PTN PTN Diingatkan Jaga Kualitas dan Integritas

JAKARTA (KR) - Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan anggaran perguruan tinggi negeri (PTN), Ditjen Diktiristek menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Triwulan II tahun anggaran 2023. Pertemuan yang diikuti seluruh pimpinan PTN Akademik ini, membahas realisasi anggaran dan nilai kinerja anggaran (NKA) triwulan II tahun 2023.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Diktiristek Nizam mendorong PTN akademik untuk meningkatkan integritas seiring mempersiapkan lulusan dengan kompetensi berdaya saing dan berakhlak mulia. Hal ini dimulai dengan pemberian contoh yang baik oleh dosen dan pengajar.

Selain itu, Nizam juga berpesan kepada pimpinan PTN agar mempercepat realisasi anggaran untuk program-pro-

gram. Penyerapan anggaran oleh PTN tercatat masih sangat rendah, bahkan ada yang belum mencapai 30%.

Pada kesempatan yang sama, Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek Srie Tjahjandarie menyampaikan, adanya evaluasi demi membangun awareness dan kolaborasi dengan perguruan tinggi terkait pelaksanaan program dan realisasi anggaran PTN.

"Kami berharap dengan

adanya rapat koordinasi ini kita bisa update perjalanan pelaksanaan program dan anggaran, karena selama satu semester ini ada beberapa catatan yang perlu disampaikan agar pada semester kedua tahun 2023 ini kita lebih cepat menuntaskan program dan anggaran yang sudah ada di PTN," jelas Tjihjik.

Sementara itu Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek Vivi Andriani turut

menyampaikan terkait capaian serapan dana dan kebijakan untuk membantu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kebijakan dari Kemendikbudristek untuk pendidikan tinggi, riset dan inovasi mengarah pada dukungan terhadap program-program seperti Kampus Merdeka, Praktisi Mengajar, Kerjasama Riset Internasional, Sinergi Riset DUDI dan PT, Infrastruktur Riset dan Hilirisasi hasil penelitian.

Dalam rangkaian acara ini juga dilaksanakan penandatanganan kontrak Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berlaku untuk satu tahun mulai Juli 2023 hingga Juli 2024. **(Ati)-f**

MENJADI MOTIVASI PARA DOSEN

Pasutri Raih Profesor di UM Purwokerto

PURWOKERTO (KR) - Pasangan suami istri (Pasutri) Prof Dr Pujiharto dan Prof Dr Sri Wahyuni baru saja dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UM Purwokerto). Prof Dr Pujiharto SP MP, guru besar bidang Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Sedangkan, istrinya, Prof Dr Sri Wahyuni SE MSi QIA, guru besar dalam bidang ekonomi.

Saat ditemui di sela-sela pengukuhan Prof Pujiharto mengatakan, pengukuhan guru besar secara bersamaan dengan istrinya itu tidak disengaja. "Ini kejadian yang tidak disengaja, tapi sudah takdir karena SKnya dikeluarkan secara bersamaan. Saya merasa bangga dan terharu dapat dikukuhkan bersama istri," kata Pujiharto.

Sedangkan Prof Sri Wahyuni menambahkan, ia menempuh

pendidikan S2 dan S3 bersama sampai keluar SK juga bersamaan. "Namun dalam mengerjakan tugas dan penelitian tetap sendiri-sendiri tidak dalam satu kamar yang sama. Kita saling *support* dan memberikan saran, mengerjakannya dan publikasi bareng,

hingga dikukuhkan bareng pula," ungkapnya.

Pasangan serasi ini memiliki tiga orang anak, yakni Al Bani Syaefullah Yuniarto Putra, Putrintan Amalia Rizqyta dan Bintang Putra Akbar. Awalnya, Prof Puji sapaan akrabnya, menempuh pendidikan sar-

jana di Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Pertanian lulus tahun 1994. Ia melanjutkan Magister S2 di UGM prodi sosial ekonomi pertanian lulus tahun 2003.

Ia diangkat menjadi staf pengajar di program studi agribisnis fakultas pertanian dan perikanan UM Purwokerto pada tahun 1995. Konsistensi dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan mengantarkannya meraih gelar doktor Bidang Ilmu Pertanian UGM tahun 2013 dengan predikat *cum laude*.

Sementara Prof Sri Wahyuni menempuh Pendidikan S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UM Surakarta lulus tahun 1996, kemudian melanjutkan S2 di UGM dan tahun 2013 menyelesaikan S3 di UGM. Sampai saat ini keduanya terus aktif melakukan berbagai penelitian. **(Dri)-f**



Prof Pujiharto dan istri Prof Sri Wahyuni.

KR-Diyanto

EKONOMI

Penanganan 25 Jalan di Jateng Capai Rp 601,7 Miliar

JAKARTA (KR) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan nilai penanganan jalan daerah melalui Inpres 3/2023 di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencakup 25 ruas jalan sepanjang 157 km mencapai sekitar Rp601,7 miliar.

"Sekarang sudah e-Katalog untuk pengadaan barang dan jasanya, mudah-mudahan Selasa (25/7) sudah tanda tangan kontrak dan langsung dikerjakan," kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan untuk perbaikan Jalan Surakarta-Geyer-Purwodadi sepanjang 59 km, sudah 8,7 km jalan rusak dikerjakan Kementerian PUPR sebelum Inpres Jalan Daerah terbit. Dengan demikian, sisanya

akan dilakukan penanganan melalui Inpres Jalan Daerah.

"Kita tangani dan kita bagi ruas ini menjadi 10 spot. Sekarang progresnya sudah 56 persen," ujar Basuki.

Penanganan Ruas Surakarta-Geyer-Purwodadi dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah - D.I Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga sejak 14 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp97,4 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Deltamarga Adyatama.

Ruas ini merupakan jalan logistik dengan status jalan provinsi yang ditangani Kementerian PUPR sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. **(Ant)-f**

DI PARUH KEDUA TAHUN 2023

OYO Optimis Tambah 500 Properti

JAKARTA (KR) - Sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, melalui kegiatan pariwisata berkualitas, pariwisata menjadi sektor andalan dalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. OYO sebagai platform akomodasi global terkemuka di dunia terus berupaya mengambil berbagai langkah strategis, inovatif dan adaptif dengan menambah 500 properti hingga akhir 2023.

Hal ini sejalan dengan fokus OYO untuk terus optimis memainkan peran sebagai katalisator melalui strategi yang berfokus dalam memaksimalkan potensi pasar lokal, inovasi teknologi, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di industri ini.

Rencana penambahan ini dilakukan OYO untuk memenuhi permintaan yang terus mengalami peningkatan. Dengan menambah properti di destinasi tujuan bisnis dan wisata seperti Jabodetabek, Bandung, Karawang, Cirebon, Yogyakarta, Sleman, Semarang, Surabaya, Malang dan Batu. Dorongan ekspansi ini juga kiat OYO dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pariwisata di destinasi super prioritas. Salah satunya dengan upaya OYO untuk

memperluas jejaknya di Mandalika, salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas, serta tujuan wisata lain yang berkembang di Indonesia timur seperti Raja Ampat di Papua, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara.

Dengan upaya untuk menggandakan jumlah properti premium di Indonesia pada tahun 2023, OYO berencana menambah sebagian besar properti di segmen premium seperti Townhouse OAK, dan Collection O, serta properti dengan harga terjangkau seperti OYO dan OYO Life juga akan ditambahkan untuk melayani lebih banyak wisatawan.

Hendro Tan, Country Operations Head, OYO Indonesia menambahkan, rencana OYO untuk tahun 2023 menunjukkan rencana pertumbuhan jangka panjang OYO di Indonesia. Melalui produk berbasis teknologi kami yang membantu pemilik properti mengelola bisnis secara efisien, ekspansi ini turut akan membantu perekonomian Indonesia dengan terciptanya lapangan kerja yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal, pemilik properti, serta masyarakat untuk memperkuat industri pariwisata berkelanjutan yang akan memberikan dampak positif pada ekosistem perhotelan di Indonesia. **(Rsv)-f**

OJK Terbitkan Spint Off Asuransi Syariah dan Reasuransi

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

"Melalui POJK ini, diharapkan pelaksanaan pemisahan unit syariah tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mewujudkan tujuan terciptanya industri asuransi syariah dan reasuransi syariah yang dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan pemegang polis dan peserta," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, di Jakarta, Sabtu (22/7).

Dikatakan, POJK 11 Tahun 2023 mengatur bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah apabila unit syariah telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, yaitu, nilai dana tabarruif

dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai dana asuransi, dana tabarruif dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit Rp100 miliar bagi unit syariah Perusahaan Asuransi, dan Rp 200 miliar bagi unit syariah Perusahaan Reasuransi.

Selain itu, Pemisahan unit syariah juga dilakukan dalam hal terdapat permintaan sendiri (inisiatif) dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi atau pelaksanaan kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi.

Bentuk pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendirikan perusahaan

asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah. Atau mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah. Atau mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib melakukan pemisahan unit syariah dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026.

"Harapan dari ketentuan ini adalah setelah tanggal 31 Desember 2026 sudah

tidak ada lagi unit syariah yang beroperasi di industri asuransi dan reasuransi," tegasnya.

Dikatakan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang melakukan pemisahan unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah baru dan belum memenuhi persyaratan ekuitas minimum sebagaimana dipersyaratkan maka wajib melakukan penambahan ekuitas unit syariah yang berasal dari pemegang saham perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Penambahan ekuitas unit syariah yang berasal dari investor baru dan/atau pengalihan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. **(Lmg)-d**

Biofuel, Alternatif Energi Terbarukan yang Berkelanjutan

JAKARTA (KR) - Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) bekerja sama dengan ASEAN Center for Energy (ACE), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC), School of Business and Management - Institut Teknologi Bandung (SBM ó ITB) akan menyelenggarakan seminar internasional yang berjudul "Integrating Biofuels as the Main Pillar of ASEAN Renewable Energy Development for a Resilient and Sustainable Just Energy Transition."

Event seminar internasional, akan dilaksanakan di Jakarta pada 2 Agustus 2023 ini, secara spesifik ingin memberikan masukan dalam pengembangan Peta Jalan Energi Terbarukan ASEAN Jangka Panjang (ASEAN Long-Term Renewable Energy Roadmap), sebagai langkah strategis dalam memajukan transisi energi di Indonesia dan ASEAN.

"Dalam seminar ini, fokus uta-

nya adalah mempromosikan transisi energi yang berkelanjutan, memperkuat kemandirian energi, dan meningkatkan ketahanan energi di kawasan," kata Vice Chairman IPOSS Bapak Sofyan Djalil, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, IPOSS bersama dengan SBM - ITB telah melakukan studi kebijakan "NAVIGATING THE FUTURE: Opportunities, Challenges and Strategies of Biofuel Development in South East Asia" yang juga akan diluncurkan pada event tersebut.

"Penyelenggaraan event ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, yang berkomitmen untuk mendorong tercapainya agenda-agenda krusial di berbagai sektor, termasuk energi," ujarnya.

Dikatakan, IPOSS dan SBM ITB memandang bahwa Biofuel menonjol sebagai alternatif yang penting bagi Indonesia dan ASEAN dalam

mencapai tujuan energi terbarukan. Pengalaman luas di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara ASEAN lainnya telah membuktikan kemampuan biofuel sebagai solusi berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan energi dan mendukung pembangunan ekonomi.

Seminar ini akan mengundang pembicara dari kalangan pengambil kebijakan, pelaku bisnis, dan Pakar Internasional dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Australia untuk berdialog dengan investor dan komunitas bisnis, think tank internasional, akademisi, dan media.

Sofyan Djalil mengatakan Biofuel menawarkan pengganti bahan bakar fosil konvensional yang lebih bersih dan lebih hijau, yang mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang signifikan. **(Lmg)-f**